
Determinan *Islamic Human Development Index* Indonesia

Vivi Nafisah^{1*}, Ali Rama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ¹ vivinafisah27@gmail.com, ² rama@uinjkt.ac.id

***)Corresponding Author**

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Demografi Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Indonesia Periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data time series dan cross section. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Regresi Data Panel dan estimasi terbaik menggunakan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap I-HDI di Indonesia, sementara Kemiskinan dan Demografi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap I-HDI di Indonesia. Kemudian Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Demografi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap I-HDI di Indonesia periode 2017-2022.

Keywords:

Islamic Human Development Index (I-HDI), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Demografi

Pengutipan:

Navisah, V., & Rama, A. (2024). Determinan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Demografi . *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, Vol. 4(1), 26-42.

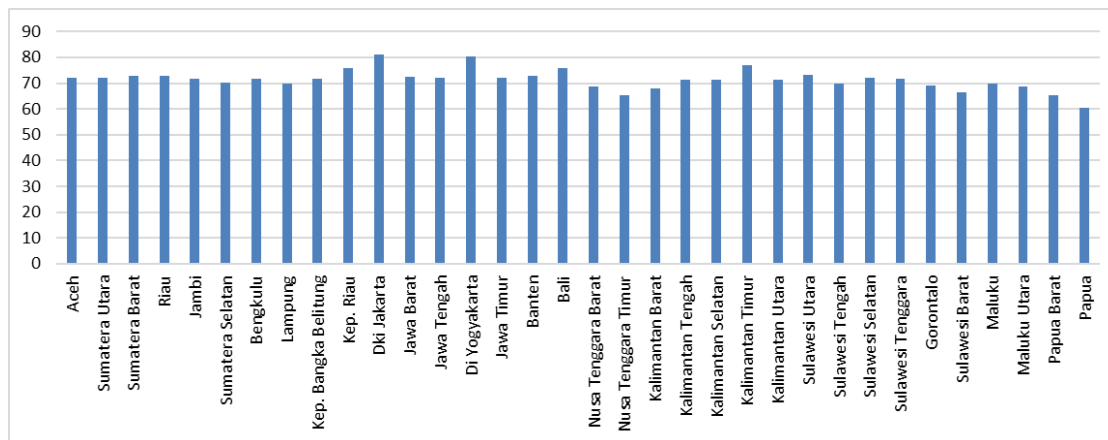
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan negara bersama-sama seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang baik dan memadai (Ariza, 2016). Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha secara sadar untuk mengubah keseimbangan taraf hidup dari yang kurang baik menuju kualitas hidup yang lebih tinggi. Dengan orientasi pada pemerataan dalam mensejahterakan rakyat banyak dengan asas keadilan. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional, dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu negara (Mirza, 2011).

Salah satu kriteria yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan 2 manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam strategi pembangunan nasional. Pada tahun 1990, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menetapkan indikator untuk menggambarkan kesejahteraan dan pembangunan manusia suatu negara secara terukur, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). UNDP memperkenalkan konsep ini secara global melalui Laporan Pembangunan Manusia pada tahun 1990 dan telah menjadi dasar pengukuran dan perhitungan kesejahteraan suatu negara (Viollani & Suprayitno, 2022).

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh UNDP dianggap sebagai salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan suatu negara dan mungkin merupakan indikator yang paling komprehensif, namun tidak sepenuhnya komprehensif dan memadai untuk mengukur pembangunan manusia dalam konsep ekonomi islam, karena teori ini tidak berdasarkan maqashid syari'ah. Oleh karena itu, cara yang lebih akurat dan tepat untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dan kesejahteraan di negara mayoritas muslim adalah dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yang merupakan terobosan baru karena konsep tersebut didasarkan pada berwawasan Islam dan berlandaskan maqashid syari'ah (Viollani & Suprayitno, 2022).

Gambar HDI menurut provinsi di Indonesia periode 2021



Dari Gambar diatas terlihat bahwa dari data tingkat IPM menurut provinsi pada tahun 2021, hanya dua provinsi yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sedangkan provinsi lainnya tersebar dan didominasi oleh kategori tinggi yaitu 21 provinsi. Kemudian kategori sedang terdiri dari 11 provinsi yaitu Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM provinsi di Indonesia belum merata karena IPM yang berada pada kategori tinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur masih banyak yang berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata dan tidak hanya di beberapa daerah saja.

Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM provinsi di Indonesia belum merata karena IPM yang berada pada kategori tinggi masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur masih banyak yang berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata dan tidak hanya di beberapa daerah saja.

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan konsep dan teori pembangunan manusia yang didasari oleh pemikiran yang berdasarkan pada persektif islam (Shalahuddin, 2022). Pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam maqashid syari'ah dijadikan teori untuk mengembangkan I-HDI. I-HDI diukur berdasarkan lima dimensi menurut Imam asy-Syatibi yang terdiri dari agama (Din), jiwa (Nafs), intelektual (Aql), keturunan (Nasl) dan harta (Maal). Kelima dimensi tersebut 6 merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar manusia dapat mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di kehidupan setelah mati. Jika salah satu dari lima kebutuhan dimensi tersebut tidak terpenuhi atau sengaja tidak dipenuhi maka kebahagiaan hidup tidak tercapai sepenuhnya (P3EI, 2012).

Dalam pembangunan manusia menurut Islam menggunakan beberapa indikator yang terdapat dalam maqashid syari'ah. Menurut AlGhazali, maqashid syari'ah diartikan sebagai lima kebutuhan manusia yang didefinisikan dalam berbagai dimensi. Jika dilihat dari sudut pandang Hifdz Din, dimana salah satu indikatornya adalah criminality index. Kemudian jika kita melihat dari aspek Hifdz Nafs dengan indikator umur harapan hidup dan prevelensi perokok merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum 7 dan meningkatkan kondisi kesehatan pada khususnya. Dan jika dilihat pada aspek Hifdz 'Aql, dengan indikator harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka partisipasi sekolah merupakan dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam aspek Hifdz Nasl, dimana indikatornya adalah angka perceraian. Terakhir jika kita melihat dari aspek Hifdz Maal, indikator nya adalah pengeluaran perkapita dan gini ratio di Indonesia.

Dalam proses pembangunan manusia, modal juga diperlukan sebagai landasan untuk menciptakan pembangunan, yakni untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia itu

sendiri (Baeti, 2013). Pemerintah mencari modal melalui investasi, yang kemudian digunakan sebagai pengeluaran pemerintah dalam proses pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting, dengan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, serta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat memberikan pengaruh melalui anggaran dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan pembangunan di bidang-bidang yang penting (Ariza, 2016).

Selain itu, penelitian ini juga menekankan upah minimum sebagai variabel yang dianggap berdampak terhadap I-HDI. Hal ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan bagian dari kebijakan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat mengatasi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antar daerah. Dalam penelitian Faizin 12 (2021) mengatakan bahwa dengan penerapan kebijakan upah minimum yang baik diharapkan dapat menurunkan laju migrasi dari desa ke kota. Dalam penelitian Wasono et al., (2020), upah minimum regional dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Untuk itu, pendapatannya harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan di masing-masing pemerintah daerah. Dengan menaikkan upah minimum provinsi maka masyarakat di daerah tersebut akan berdaya.

Selanjutnya variabel dalam penelitian ini adalah Kemiskinan. Kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan. Dari perspektif luas, kemiskinan menyiratkan ketidakberdayaan individu untuk memenuhi kebutuhan terhadap dirinya (Amaluddin et al., 2018). Konsep kemiskinan tidak hanya mencakup tingkat pendapatan dan konsumsi, namun juga kesehatan dan pendidikan, kerentanan dan risiko, serta marginalisasi dan eksklusi masyarakat miskin dari masyarakat umum (V. Singh, 2023). Selain itu, status kemiskinan juga dapat ditentukan berdasarkan kemampuan memenuhi taraf hidup melalui perolehan pendapatan (Khaliq & Uspri, 2017). Kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan dari infrastruktur, teknologi terutama karena oportunisme dari pihak elit politik dan birokrasi untuk memuaskan kebutuhan mereka (Atkinson, 2021). Akibat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar sektor dan wilayah serta perubahan struktur perekonomian suatu negara, maka tingkat kemiskinan juga erat kaitannya dengan dinamika perekonomiannya (Zhang & Ben Naceur, 2019).

Pembangunan manusia juga berkaitan dengan kondisi demografi yaitu jumlah penduduk khususnya penduduk produktif, seberapa besar penduduk produktif menunjang kehidupan penduduk tidak produktif dalam suatu keluarga, berdampak besar terhadap kemampuan mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif, maka semakin besar kemungkinan tercapainya Indeks Pembangunan Manusia. Namun bonus demografi ini tidak serta merta berdampak positif terhadap tujuan pembangunan nasional. Ibarat pedang bermata dua, bonus demografi dapat memberikan dampak positif namun juga negatif terhadap pembangunan bangsa. Apabila suatu negara tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut masa bonus demografi, maka dampak negatifnya akan ditanggung oleh semua pihak. Tanpa dibekali sumber daya manusia

yang berkualitas dan memadai, seperti sebagian besar penduduk usia kerja pada saat itu hanya akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

KAJIAN LITERATUR

Teori Pembangunan Ekonomi

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu kondisi dimana terjadi peningkatan output ekonomi secara agregat. Hal ini dapat diukur dengan melihat peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi yang biasanya diukur dengan pendapatan per kapita, yang secara sederhana memberikan gambaran seberapa besar nilai ekonomi yang diberikan seseorang dalam suatu periode tertentu.

Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan struktural perekonomian dari sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Mirip dengan paradigma peningkatan nilai ekonomi, sektor jasa memberikan lebih banyak nilai tambah ekonomi dibandingkan sektor manufaktur atau pertanian. Oleh karena itu, fokus strategi pembangunan adalah mempercepat industrialisasi dan meningkatkan produksi dan pertumbuhan secara signifikan.

Islamic Human Development Index (I-HDI)

I-HDI adalah singkatan dari Islamic Human Development Index dan digunakan sebagai alat untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Mengukur indeks pembangunan manusia dalam perspektif Islam memerlukan indikator khusus yang mendukung berbagai jenis kebutuhan dasar manusia (masalah) untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat (Rukiah et al., 2019). Konsep penting dari tujuan pembangunan manusia dalam Islam berpusat pada tujuan paling tinggi yaitu maqashid syari'ah, yang terdiri dari tiga tujuan dasar yaitu pendidikan individu, menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua atau masalah.

Maqashid syari'ah dapat diartikan sebagai dasar pemikiran syariah yang mencakup semua kebutuhan manusia yang dirancang untuk melindungi kepentingan umat manusia dalam semua bagian dan aspek kehidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syatibi, unsur-unsur maqashid syari'ah diringkas menjadi 5 berkas berlapis, yaitu Hifdz Din membahas aspek ketuhanan, Hifdz Nafs membahas unsur umur panjang dan sehat, Hifdz 'Aql membahas aspek penjelasan, Hifdz Nasl keluarga dan keturunan. selanjutnya Hifdz Maal membahas aspek pendapatan (Anshori, 2022). Menurut Al-Ghazali maqashid syari'ah diinterpretasikan kedalam lima kebutuhan manusia yaitu, menjaga agama (Hifdz Din), menjaga jiwa (Hifdz Nafs), menjaga akal (Hifdz 'Aql), menjaga keturunan (Hifdz Nasl) dan menjaga harta (Hifdz Maal) (Ariza, 2012).

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Menurut Suparno (2014), pengeluaran pemerintah dalam suatu negara sangat penting dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang, misalnya di bidang sarana dan prasarana, yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dumairy (1999) dalam Suparno (2014), kebijakan pemerintah adalah suatu langkah pemerintah dalam melaksanakan pengeluaran untuk memenuhi fungsi yang stabil, alokatif, dinamis, dan distributif. Pendidikan merupakan elemen penting dalam memperoleh keterampilan manusia yang diperlukan untuk kehidupan sosial. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan mengadopsi teknologi modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pendidikan selalu menjadi investasi yang mempengaruhi masa depan setiap masyarakat. Pendidikan merupakan modal dasar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah harus menyediakan alokasi untuk sektor pendidikan yang akan digunakan tidak hanya untuk investasi dalam pembentukan sumber daya manusia, namun juga untuk nasihat pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Sejauh mana peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran pemerintah (publik) yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Pembangunan di bidang pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, mutu, relevansi, dan daya saing. Kedua, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan menunjukkan upaya pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan dan memenuhi kewajiban konstitusi bahwa alokasi anggaran pada fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja negara (Kemenkeu, 2016)

Upah Minimum Provinsi

Penentuan upah minimum masih menjadi topik diskusi utama di kalangan pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja setiap tahunnya (Izzaty & Sari, 2013). Penetapan upah minimum masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan nasional di Indonesia. Setiap negara bagian mempunyai pengalaman dan dilema tersendiri dalam menetapkan upah minimum. Sebagai, persyaratan dasar bagi pekerja dan agar dunia usaha dan perekonomian dapat tumbuh dan menjadi lebih produktif dan kompetitif. Upah yang diberikan oleh seorang pekerja tergantung pada kemampuan pekerja tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin produktif seorang pekerja maka akan semakin besar upahnya, begitu pula sebaliknya semakin rendah produktivitas seorang pekerja maka akan semakin kecil upah yang dihasilkannya.

Penetapan upah minimum yang disesuaikan dengan penilaian kebutuhan hidup layak, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL (Kebutuhan Hidup Layak) adalah kebutuhan standar seorang pekerja selalu jomblo agar bisa hidup layak dalam jangka waktu sebulan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan penetapan upah minimum adalah bagian dari instrumen kebijakan yang bertujuan menciptakan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh implementasinya kebijakan upah minimum dengan tepat harus mengurangi tingkat migrasi desa ke kota. Pada saat yang sama, politik upah minimum juga dapat berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan (Faizin, 2021).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat mendasar pada kesejahteraan sosial dan merupakan tanda yang paling jelas dalam menilai suatu kondisi ekonomi, sosial, dan

pembangunan budaya (Robati et al., 2020). Dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu konsep yang terintegrasi dalam banyak aspek, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, menghadapi kondisi darurat, ketergantungan, dan isolasi baik secara geografis maupun sosiologis (Dalimunthe & Imsar, 2023). Kemiskinan sering disebut-sebut sebagai sumber berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan yang tinggi mau tidak mau akan menurunkan kualitas pembangunan manusia. sebaliknya. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia sangat bergantung pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Menurut Yacoub (2012), dalam penelitiannya kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar, karena kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam hidup dan kemiskinan merupakan permasalahan global karena kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan I-HDI. Kemiskinan diketahui mempengaruhi kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengakses kesejahteraan. Oleh karena itu, kemiskinan sering disebut sebagai masalah dalam hal pembangunan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demografi

Demografi menurut Hauser dan Duncan (Adioetomo dan Samosir, 2013) adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, sebaran, wilayah dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena kelahiran (fertilitas), kematian dan pergerakan teritorial (migrasi). Demografi erat kaitannya dengan jumlah penduduk usia kerja dan jumlah penduduk di suatu wilayah (Prskawetz & Sambt, 2014). Potensi sumber daya manusia Indonesia sangat besar, dan hingga tahun 2035, Indonesia akan menikmati bonus demografi yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan dan kemajuan negara. Jika kita gagal meningkatkan kualitas penduduk produktif dan menyediakan lapangan kerja melalui kebijakan yang mengarah pada investasi produktif padat karya, maka bonus demografi akan terbuang percuma. Dengan memanfaatkan bonus demografi, pertumbuhan ekonomi di masa depan dapat ditingkatkan.

Bonus demografi ini bisa memberikan manfaat besar bagi Indonesia, namun pemerintah perlu menyiapkan generasi muda berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja. Jika kita tidak mampu menghadapi adanya bonus demografi, maka yang terjadi adalah ledakan pengangguran usia kerja dan bertambahnya beban pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Di sisi lain, bonus demografi menimbulkan bencana, menurut Mukri (2018), jika akses masyarakat masih rendah dalam hal pendidikan dan kesehatan. Selain itu kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat kelas menengah ke bawah akan terus meningkatkan kejahatan dan kriminalitas. Akibatnya akan berdampak langsung pada produksi barang dan jasa dan pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

METODE

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data diperoleh dari Instansi Pemerintah, Badan Pusat Statistik, Website Resmi Pemerintah, Jurnal, Buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang masuh relevan dengan variabel yang diteliti. Data dikumpulkan menggunakan aplikasi *microsoft excel* dan kemudian dianalisis dengan metode regresi data panel yang diolah dengan bantuan aplikasi Eviews.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI), Sementara variabel independen yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Demografi. Penelitian ini menggunakan waktu pengamatan selama enam tahun (2017-2022) yang disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Selanjutnya, objek penelitian yang digunakan adalah 34 provinsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	56.571962	(33,166)	0.0000
Cross-section Chi-square	511.064556	33	0.0000

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai Probabilitas Cross-section F adalah 0.0000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi alpha (0.05), maka keputusannya adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	62.490783	4	0.0000

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai Probabilitas Cross-section Random adalah 0.0001 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi alpha (0.05), maka keputusannya adalah *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat untuk digunakan pada penelitian ini dibandingkan *Random Effect Model* (REM).

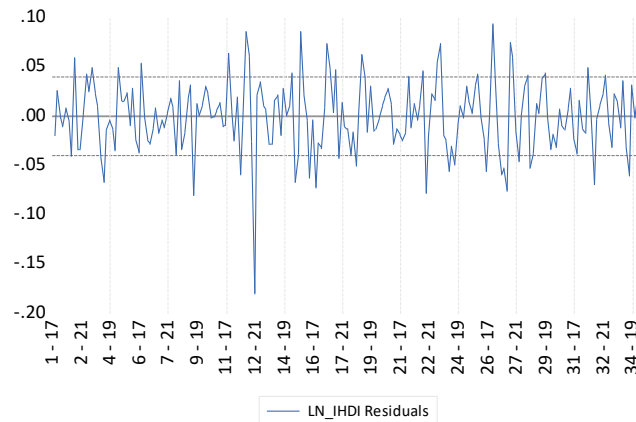
Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

1	0.19537679...	0.78220831...	0.72085021...
0.19537679...	1	0.14942458...	0.29772909...
0.78220831...	0.14942458...	1	0.78405115...
0.72085021...	0.29772909...	0.78405115...	1

Koefisien korelasi X1, X2, X3 dan X4 < 0,85. maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lulus uji multikolinearitas. Nilai negatif diabaikan karena uji dua arah.

Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik residual (warna biru) diatas dapat dilihat tidak ada yang melewati batas (500 dan -500), artinya vaian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu e al, 2021 : 143)

Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: LN_IHDI
Method: Panel Least Squares
Date: 07/06/24 Time: 14:56
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.296385	2.825396	-1.874564	0.0626
LN_PENDIDIKAN	0.036652	0.010976	3.339361	0.0010
UMP	0.123603	0.031814	3.885148	0.0001
LN_KEMISKINAN	-0.262909	0.057903	-4.540475	0.0000
DEMOGRAFI	-4.83E-08	1.43E-08	-3.387761	0.0009

Berdasarkan hasil output pada tabel di atas, maka model regresi yang terbentuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LnY} = -5.2963 + 0.0366 \text{ Ln_Pendidikan} + 0.1236 \text{ UMP} - 0.2629 \text{ Ln_Kemiskinan} - 4.83\text{E-}08 \text{ Demografi}$$

Berikut penjelasan lebih detail dari persamaan regresi:

1. Nilai konstanta sebesar -5.2963 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), Kemiskinan (X3), dan Demografi (X4) bernilai nol, maka nilai *Islamic Human Development Index* (Y) akan mengalami penurunan sebesar -5.2963 persen.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0366 , hal itu menjelaskan setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 1 satuan, maka nilai *Islamic Human Development Index* (Y) akan meningkat sebesar 0.0366 persen.
3. Variabel Upah Minimum Provinsi (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.1236 , hal itu menjelaskan setiap kenaikan Upah Minimum sebesar 1 satuan, maka nilai *Islamic Human Development Index* (Y) akan meningkat sebesar 0.1236 persen.
4. Variabel Kemiskinan (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.2629 , hal itu menjelaskan setiap kenaikan Kemiskinan Provinsi sebesar 1 satuan, maka nilai *Islamic Human Development Index* (Y) akan menurun sebesar -0.2629 persen.
5. Variabel Demografi (X4) memiliki nilai koefisien sebesar $-0.483E-08$, hal itu menjelaskan setiap kenaikan Demografi sebesar 1 satuan, maka nilai *Islamic Human Development Index* (Y) akan menurun sebesar $-0.483E-08$ persen.

Uji Statistik

UJI T (Parsial)

Dependent Variable: LN_IHDI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/06/24 Time: 14:56
 Sample: 2017 2022
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.296385	2.825396	-1.874564	0.0626
LN_PENDIDIKAN	0.036652	0.010976	3.339361	0.0010
UMP	0.123603	0.031814	3.885148	0.0001
LN_KEMISKINAN	-0.262909	0.057903	-4.540475	0.0000
DEMOGRAFI	-4.83E-08	1.43E-08	-3.387761	0.0009

Berikut penjelasan lebih detail dari persamaan regresi:

1. Hasil uji t pada diatas menunjukkan bahwa variabel X1 atau Pengeluaran Pendidikan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0.0010 < 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel $3.3393 > 1.9717$. Hasil ini menunjukkan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap *Islamic Human Development Index* (Y).
2. Hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel X2 atau Upah Minimum Provinsi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0.0001 < 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel $3.8851 > 1.9717$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap *Islamic Human Development Index* (Y).
3. Hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel X3 atau Kemiskinan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0.0000 < 0,05$ dan t hitung lebih kecil dari t tabel $- 4.5404 < 1.9717$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap *Islamic Human Development Index* (Y).
4. Hasil uji T pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel (X4) atau Demografi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α atau $0.0009 < 0,05$ dan T hitung lebih kecil dari T tabel $- 3.3877 < 1.9717$. Hasil ini menunjukkan bahwa Variabel Demografi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap *Islamic Human Development Index* (Y).

UJI F (Simultan)

R-squared	0.974279
Adjusted R-squared	0.968546
S.E. of regression	0.040123
Sum squared resid	0.267241
Log likelihood	387.5843
F-statistic	169.9432
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 169.9432 sementara F tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ sebesar 2.4170. Dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel atau $169.9432 > 2.4170$, serta nilai probabilitas lebih kecil dari α atau $0.000000 < 0,05$ sehingga H1 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.974279
Adjusted R-squared	0.968546

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, nilai Adjusted R-Squared (adj R2) sebesar 0.9685.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H_a diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2003) bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Mengingat modal tersebut di atas merupakan hasil investasi pemerintah di bidang pendidikan.

Sebagai contoh pada indikator Hifdz 'Aql, angka partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Diasumsikan orang yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki kemampuan terbatas untuk berpartisipasi dalam sekolah. Disitulah pentingnya peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Masyarakat yang tidak mampu berpartisipasi dalam pendidikan karena keterbatasan biaya, diharapkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel upah minimum secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) yang menunjukkan bahwa hipotesis H_a diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari & Yusniar (2019) yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum berdampak positif terhadap peningkatan hasil pembangunan manusia.

Sebagai contoh hubungan antara upah minimum provinsi terhadap dimensi I-HDI yaitu pada indikator Angka Perceraian pada Hifdz Nasl. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat perceraian dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial yang saling berhubungan. Peningkatan upah minimum sering kali berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, mengurangi stres finansial yang menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Ketika pasangan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi pengeluaran tak terduga, mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Tingkat kemiskinan juga menjadi permasalahan serius dalam upaya peningkatan I-HDI di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan pendapatan per kapita yang rendah tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam penelitian Anita dan Riswan (2019), bahwa kemiskinan menghalangi individu untuk memperoleh makanan bergizi, pendidikan yang memadai, dan lingkungan yang sehat.

Sebagai contoh, Angka Kriminalitas pada Dimensi Hifdz Din dan hubungannya dengan Kemiskinan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Diasumsikan orang yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan untuk berpartisipasi dalam dalam kegiatan bermasyarakat karena keterbatasan biaya, akan melakukan apapun termasuk tindak kriminalitas.

Pengaruh Demografi Terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Proporsi penduduk suatu wilayah, meliputi komposisi umur, angka kelahiran (indeks kesuburan) dan angka kematian bayi (mortalitas indeks), komposisi usia kerja dan hubungannya dengan ketersediaan lapangan kerja merupakan faktor penentu tercapainya kualitas pembangunan manusia suatu negara. Namun populasi ini bukanlah satu-satunya variabel penentu pencapaian IPM yang tinggi. Jumlah penduduk produktif tidak akan ada artinya jika tidak tersedia lapangan kerja dan pendidikan yang memadai.

Pengaruh demografi, terutama jumlah masyarakat yang bekerja, memiliki dampak signifikan terhadap indikator Pengeluaran Perkapita dan Gini Ratio (ketimpangan) pada dimensi Maal, yang mencakup aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi. Peningkatan jumlah angkatan kerja dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan cacatan jumlah lapangan pekerjaan cukup memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa secara parsial untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan dan Demografi berpengaruh terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI). Kemudian secara keseluruhan variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan dan Demografi berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) tahun 2017-2022.

Daftar Pustaka

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah*. 117–127
- Anto, M. H. (2009). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19 No.2, Life 1, 69–95.

- Ariza, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Perspektif Islam. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.348>.
- Atkinson, W. (2021). Fields and Individuals : From Bourdieu to Lahire University of Bristol - Explore Bristol Research. *European Journal of Social Theory*, 24(2), 195–210.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 Info Artikel. *Edaj*, 2(3), 85–98.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 111–123. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/686>
- Cakara, & Yasin. (2017). *Spatial Data Panel*. Wade Group.
- Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HdI) di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 118–132. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198>
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227.
- Hakim, A. A., & Sukmana, R. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)*. Li Falah 2(1).
- Haque, M. I., & Khan, M. R. (2019). Role of oil production and government expenditure in improving human development index: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 251–256. <https://doi.org/10.32479/ijcep.7404>
- Hasibuan, S. A., Syahbudi, M., Islam, P. E., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia*. 7(30), 1158–1166.
- Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 137–138. <http://wartaeкономи.co.id/berita7450/perburuhan-menjaga-keselimbangan-upahdan-produktivitas-bagian-ii.html,diakses20Maret2013>
- Jhingan, M. . (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada .
- Khaliq, A., & UsPri, B. (2017). Kemiskinan Multidimensi Dan Perlindungan Sosial. *Business Management Journal*, 13(2), 107–132.

- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Jejak*, 4(2), 102–113.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 2–15. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/474>
- Mohd Amin, R., Abdullah Yusof, S., Aslam Haneef, M., Omar Muhammad, M., & Oziev, G. (2015). *Developing Inclusive and Sustainable Economic and Financial Systems The Integrated Development Index (I-Dex): A new comprehensive approach to measuring human development*.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Prskawetz, A., & Sambt, J. (2014). Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. *Demographic Research*, 30(1), 963–1010. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2014.30.34>
- Rafsanjani, H. (2018). *Islamic Human Development Index Di Indonesia* .
- Rama, A., & Yusuf, B. (2019). Construction of Islamic human development index. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 32(1), 43–64. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3>
- Ramadona, A., Riswan, & Dailami. (2019). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pemabngunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2015*.
- Robati, F. N., Akbarifard, H., & Jalae, S. abdolmajid. (2020). Poverty modeling in the Islamic Republic of Iran using an ANFIS optimized network with the differential evolution algorithm (ANFIS_DE). *MethodsX*, 7, 101120. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.101120>
- Rukiah, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqhasid Syariah). *Istinbâth*, 18(2), 307–327.

- Septiarini, M. M. (2017). *Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) di Jawa Timur | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan. <https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6886>
- Shalahuddin, H. (2022). Analisis APBD Perspektif Islamic Human Development Index Kota Bogor Tahun 2021. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 109–124. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.56>
- Shi, Z., & Qamruzzaman, M. (2022). Re-Visiting the Role of Education on Poverty Through the Channel of Financial Inclusion: Evidence From Lower-Income and Lower-Middle-Income Countries. *Frontiers in Environmental Science*, 10(May), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.873652>
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Sudarmanto, E., Rahmadana, M. F., Rozaini, N., Sulaeman, A. R., Basmar, E., Elistia, A., Yulfiswandi, & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* / Sugiyono (ed. 1). Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS* (1st ed.). Yogyakarta: ANDI Yogyakarta .
- Supaijo, Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan , dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam:Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–22.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). *SMERU Working Paper, April*(April), 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- Swaramarinda, D. R. (2014). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 2(2), 63. <https://doi.org/10.21009/jpeb.002.2.5>
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan EKonomi Edisi Ke Sembilan (Ke Sembila)*. Erlangga. www.erlangga.co.id
- Viollani, K. A., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh islamic human development index dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening. 4(11), 5233–5244.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekosina : Yogyakarta .

Widarjono, A. (2013). *Ekometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta : Ekonosia.

Zhang, R., & Ben Naceur, S. (2019). Financial development, inequality, and poverty: Some international evidence. *International Review of Economics and Finance*, 61(December 2018), 1–16.